

ABSTRAK

Peningkatan kasus korupsi di Indonesia disebabkan kurang optimalnya upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu tindakan korupsi yang diatur dalam UNCAC adalah *illicit enrichment*, yaitu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh pejabat negara. Namun Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai *illicit enrichment* tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaturan pemidanaan korupsi di Indonesia berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dalam menyelamatkan aset negara dan bagaimana formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* melalui tindakan *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya menyelamatkan aset negara. Tujuan penelitian ini penulis menawarkan konsep formulasi kriminalisasi *illicit enrichment* dengan tindakan *ncb asset forfeiture*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian didasarkan teori relatif, yakni pemidanaan bertujuan melindungi masyarakat dan negara serta mengurangi angka kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan UU PTPK mengatur mengenai pemulihan aset melalui gugatan perdata, uang pengganti dan pembayaran denda, serta konsep kriminalisasi *illicit enrichment* sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2006 ke dalam perubahan kedua UU PTPK yang dipadupadankan dengan pembuktian terbalik menggunakan *ncb asset forfeiture*, dengan memperhatikan HAM. Solusi ini diharapkan mampu meningkatkan pengembalian aset negara dari perbuatan *illicit enrichment*.

Kata Kunci: Korupsi, *Illicit Enrichment*, Pembuktian Terbalik, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Abstract

Corruption case get increased in Indonesia caused by the eradication of corruption is not optimal. Indonesia has ratifying the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) through Law Number 7 of 2006. One of the acts of corruption regulated in UNCAC is Illicit Enrichment, which is a criminal act of self-enrichment committed by state officials. The problem in this study is how to formulate illicit enrichment criminalization through non-conviction based asset forfeiture actions as an effort to save state assets. Based on the type, this research is a normative legal research that uses secondary and tertiary data sources. Data analysis using statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the concept of criminalization of Illicit Enrichment must be applied in positive law and combined through a system of proof against the confiscation of assets without punishment or non-conviction based asset forfeiture, of course by still paying attention to human rights. This solution is also expected to be able to increase the return of state assets from the Illicit Enrichment.

Keyword: *Corruption, Illicit Enrichment, Shifting Burden of Proof, Non-Conviction Based Asset Forfeiture.*